

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lasem adalah kota yang berlokasi di Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Lasem populer sebagai kota Pusaka sebab Lasem memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan kerajinan yang sangat menarik bagi wisatawan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir Lasem mengalami kemunduran dan kehancuran budaya. Banyak bangunan bersejarah yang rusak, seni dan kerajinan tidak lagi berkembang dan kehilangan kearifan lokal yang telah menjadi identitas kota tersebut. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beragam faktor, misalnya pergantian pola hidup masyarakat, kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan budaya, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya melestarikan warisan budaya tersebut.

Kota Lasem merupakan salah satu kota cagar budaya karena banyaknya temuan benda cagar budaya. Dilakukannya Kajian Lasem dalam penetapannya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) dimulai pada tahun 2019 oleh Kemendikbudristek. Penelitian Alifa Andita Taufan dan Muhammad Ando Gofar mengungkapkan bahwa kawasan Lasem memiliki permasalahan baik fisik maupun non-fisik selama proses menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN). Selain itu, kurangnya kesepakatan antara masyarakat dan pihak perencana, atau PUPR, mengenai revitalisasi Kota Pusaka Lasem, serta tidak adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan.¹

Selaras dengan permasalahan tersebut, sebagaimana yang dikutip dari Rejogja, Yayasan Lasem Heritage (YLH) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka dialog dengan warga mengenai penataan Lasem sebagai Kota Pusaka yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: tidak terdapat pemberitahuan mengenai proyek, peluang PKL di pedestrian, penataan pedestrian yang nantinya tidak terdapat *parking on street*, dan tidak tersedianya lokasi untuk bongkar muat barang di sepanjang jalan kolektor primer Lasem (Jalan jatirogo), saluran air dengan U Ditch yang menghalangi saluran aktif dari rumah/toko milik masyarakat, serta prosedur pekerjaan yang tidak berurutan.

¹ Alifa Andita Taufan dan Muhammad Andi Gofar, "Kajian Manajemen Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya: Studi Kasus Kawasan Pusaka Lasem," *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 12, no. 1 (2023): 23.

Selain itu YLH juga mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan sudah merusak beberapa penggal saluran kuno di daerah desa Karangturi yang sudah tercatat sebagai Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tentunya akan berdampak pada hilangnya nilai penting wilayah dan memori kolektif masyarakat.²

Selain menggunakan dana dari luar badan pengelola, Yayasan Pusaka Lasem adalah organisasi yang mengawasi pendapatan ekonomi daerah dan bertanggung jawab untuk mengelola pemeliharaan, konservasi, dan restorasi cagar budaya di daerah tersebut.³ Ada tiga peluang yang tersedia di Kota Lasem, yang juga disebut sebagai Kota Pusaka. Yang pertama adalah Warisan Alam, yang terdiri dari gunung, pantai, hutan, dan fitur alam lainnya. Warisan budaya meliputi kesenian Laesan, pertunjukan wayang, tarian, kuda lumping, tambak garam, bisnis makanan laut (ikan asin dan terasi), barongsai, batik Lasem, ketoprak, dan cara hidup masyarakat Lasem yang penuh toleransi. Warisan lanskap budaya Saujana yang terdiri dari perbukitan, kapal, dan kota.⁴

Kota Lasem yang memiliki banyak potensi sudah seharusnya dijaga supaya potensi yang ada pada kota tersebut tidak hilang dan identitas kota tetap dikenal oleh publik, selain itu dari adanya beragam potensi yang ada pada sebuah wilayah diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan masyarakat pada wilayah tersebut, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal. Untuk menjaga kekayaan alam dan potensi yang ada salah satunya dapat dilakukan revitalisasi. Revitalisasi ialah usaha yang dijalankan guna memperbaharui ulang pelaksanaan rencana tertentu supaya hasil yang diperoleh bisa sesuai harapan atau semaksimal mungkin dalam melampaui harapan.⁵ Dalam implementasi revitalisasi kota, diperlukan peran dari berbagai pihak, antara lain dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

² Muhammad Fakhruddin dan Bowo Pribadi, "YLH Desak Kementerian PUPR Buka Ruang Dialog Dengan Warga," Rejogja, 2022, <https://rejogja.republika.co.id/berita/r6cy61327/ylh-desak-kementerian-pupr-buka-ruang-dialog-dengan-warga>.

³ Yosua Adrian Pasaribu dkk, "Partisipasi Masyarakat Kota Lasem Lama Dalam Penetapan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional," *AMERTA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 40, no. 1 (2022):62.

⁴ Farah Fauziyah Haqiqi dan Elen Inderasari, "Moderasi Beragama Dalam Motif Batin 'Tiga Negeri' (Tionghoa, Jawa, Dan Atab) Di Kota Lasem (Tinjauan Semiotika Sastra)," *International Conference on Cultures & Languages* 1, no. 1 (2022): 230.

⁵ Niken Larasati Sosodoro dkk, *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 44.

Kegiatan revitalisasi merupakan salah satu bentuk manajemen pengelolaan cagar budaya (*Cultural Heritage Management*). *Cultural Heritage Management* dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu dinamika kehidupan yang bergerak cepat sehingga berisiko terhadap aset cagar budaya fisik dan yang kedua adalah kemungkinan menghilangnya pengetahuan mengenai cagar budaya yang terkait. Kegiatan revitalisasi tersebut penting untuk dilakukan sebab Kawasan Pusaka Lasem perlu dilihat dari aspek kesejarahan, budaya, sosial, tempat, dan objek juga nilai-nilai *heritage*, signifikansi dan *spirit of place* yang menjadi identitas Kawasan Pusaka Lasem. Tujuan adanya *Cultural Heritage Management* adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat lokal dan pengunjung seberapa pentingnya dan mengapa perlu dilakukan konservasi di Kawasan Lasem.⁶

Tata kelola kolaboratif merupakan salah satu sudut pandang dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengelolaan kebijakan, terutama yang terkait langsung dengan partisipasi pemangku kepentingan. Proses penentuan kebijakan dan pengelolaan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara positif, yang melibatkan sektor publik, swasta, dan/atau pemerintah, dikenal sebagai tata kelola kolaboratif. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk partisipasi aktif, saling mendukung, dan kapasitas untuk menggunakan perilaku kolektif yang dapat mendorong pencapaian tujuan strategis yang harus dicapai secara bersama-sama.⁷ Dalam sudut pandang ini, pemerintah memainkan peran penting sebagai fasilitator dan koordinator dalam proses revitalisasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan program yang dibuat untuk revitalisasi kota didasarkan pada partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses revitalisasi berjalan secara adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada konteks kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka, masih terdapat beragam permasalahan yang belum teratasi secara optimal, sehingga memengaruhi kemunduran dan kehancuran budaya yang dimiliki Kota Lasem. Perspektif *collaborative governance* diharapkan dapat menciptakan kesempatan untuk memperbaiki

⁶ Taufan and Gofar, "Kajian Manajemen Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya: Studi Kasus Kawasan Pusaka Lasem," 2023.

⁷ Angga Wijaya Holman Fasa dan Mahardhika Berliandaldo, "Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif Collaborative Governance," *INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan* 19, no. 1 (2022).

lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pada perspektif ini berbagai pihak saling menghargai dan menghormati keahlian dan kepentingan masing-masing, sehingga dapat mencapai tujuan yang sama melalui strategi yang lebih efektif dan efisien. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji mengenai kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka perspektif *Collaborative Governance* yang mana diharapkan dapat diketahui permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak lainnya sebagai pelaksana revitalisasi Kota Lasem.

Dalam pandangan peneliti 70 % program kebijakan revitalisasi lasem kota pusaka sudah terlaksana didukung oleh beberapa alasan akademik yang kuat, sebagai berikut:

Pertama

Konservasi Warisan Budaya:

- Lasem memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, dan penelitian ini dapat membantu mengembangkan strategi untuk melestarikan warisan tersebut. Menggunakan perspektif kolaboratif pemerintah dapat memastikan bahwa upaya pelestarian melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Kedua

Model Kolaboratif Pemerintah:

- Studi ini dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang kolaborasi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan entitas lain dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi. Ini relevan mengingat pentingnya pendekatan terpadu dalam mengelola kota pusaka.

Ketiga

Pengembangan Ekonomi Lokal:

- Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana revitalisasi kota pusaka seperti Lasem dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Perspektif kolaboratif dapat menjelaskan peran pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan investasi sektor swasta.

Keempat

Inovasi Kebijakan Publik:

- Studi ini dapat menawarkan wawasan tentang inovasi kebijakan publik dalam konteks pelestarian kota pusaka. Dengan mengeksplorasi model kolaboratif, penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di kota-kota pusaka lainnya.

Kelima

Keterlibatan Masyarakat:

- Penelitian ini dapat menilai dampak keterlibatan masyarakat dalam proses revitalisasi. Perspektif kolaboratif menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, yang dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan revitalisasi.

Keenam

Pengelolaan Berkelanjutan:

- Revitalisasi yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan revitalisasi yang berkelanjutan.

Ketujuh

Pemecahan Masalah Multidimensional:

- Kebijakan revitalisasi seringkali melibatkan berbagai aspek seperti tata ruang, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan kolaboratif dapat membantu mengatasi kompleksitas ini dengan lebih efektif.

Dengan alasan-alasan akademik ini, penelitian mengenai kebijakan revitalisasi Lasem dari perspektif kolaboratif government menjadi penting dan relevan. Studi ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga pada pengembangan model kebijakan yang inovatif dan partisipatif.

Alasan peneliti memilih judul ini adalah revitalisasi diperlukan agar ciri khas pada sebuah kawasan atau daerah tidak rusak atau hilang, sehingga hal tersebut perlu dilestarikan agar sebuah kota memiliki karakter atau citra tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Selain itu, pada pelaksanaannya revitalisasi dilakukan oleh pemerintah sebagai pemain utama dan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat sebagai pelaksana, pengawas, dan aspirasi. Pemerintah kota Lasem sudah berupaya merevitalisasi atau menghidupkan kembali kekayaan yang dimiliki

oleh kota Lasem. Namun terjadi berbagai permasalahan dalam proses revitalisasi tersebut.

Penelitian ini diperlukan agar diketahui bagaimana penerapan kebijakan revitalisasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Lasem dalam menghidupkan kembali kawasan yang menjadi ciri khas dari kota Lasem sebagai Kota Pusaka perspektif *collaborative governance*.

Di mana pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu menata kota Lasem sebagai Kota Pusaka relevan dengan kepentingan dan peluang yang terdapat dalam daerah tersebut, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan atau merasakan dampak yang optimal dari kegiatan revitalisasi yang dilakukan.

Penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai model yang diterapkan oleh pemerintah dalam merevitalisasi Lasem sebagai Kota Pusaka, sehingga dari model yang diterapkan tersebut dapat diketahui dampak dari proses revitalisasi kota Lasem, baik dampak positif maupun negatif. Sehingga diharapkan terdapat solusi yang tepat guna menangani dampak negatif tersebut, agar tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun oleh berbagai pihak yang terkait termasuk masyarakat dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dan masyarakat tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pendapatan daerah dari hasil pariwisata, sebab kota Lasem memiliki kekayaan dan budaya yang tidak dimiliki daerah lainnya. Tujuan dari revitalisasi tersebut juga agar kawasan kota Lasem sebagai Kota Pusaka dapat tertata dan dikelola dengan tepat, alhasil menjadi daya tarik bagi wisatawan serta mampu memberikan kesan khas untuk wisatawan yang berkunjung ke kota Lasem.

Penelitian mengenai kebijakan revitalisasi dalam perspektif *collaborative governance* sudah pernah dilakukan, salah satunya penelitian yang dijalankan oleh Bayu Priambodo dengan judul “Proses Pengembangan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif,” hasilnya menunjukkan kerjasama kota Surabaya dengan pemain lainnya belum efektif, karena terdapat kegiatan yang beroperasi secara sendiri-sendiri, masyarakat tidak terlibat, dan individu swasta yang berperan sebagai pengembang tidak menggunakan warga sebagai pegawainya.⁸

⁸ Bayu Priambodo, “Proses Pengembangan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif,” *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 2, no. 2 (2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Mahfuzh, Ari Subowo, dan Teuku Afrizal dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Semarang: Perspektif *Collaborative Governance* Selama Pandemi Covid-19 Di Kampung Wisata Taman Lele,” hasilnya menunjukkan UPTD Kampung Wisata Taman Lele, Bidang Industri Pariwisata DISBUDPAR, dan warga telah melaksanakan kegiatan secara optimal yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah kunjungan pariwisata serta tertutupnya PAD pada tahun 2020-2021. Akan tetapi, warga masih belum mendapatkan hasil yang maksimal ketika berjualan di wisata tersebut dikarenakan masih sepi pengunjung pada hari biasa.⁹

Kemudian penelitian lainnya juga dilakukan oleh Baewuni Muhammad Arif dan Inayati dengan judul “Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Indonesia Dalam Perspektif *Collaborative Governance*: Kajian Literatur,” hasilnya menunjukkan terdapat beberapa solusi, yaitu pemeriksaan oleh Badan Pendapatan Daerah, bekerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, dan tata Kelola kolaboratif dengan pemangku kepentingan guna menyelesaikan transaksi memakai aplikasi online.¹⁰

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Angga Wijaya Holman Fasa dan Mahardhika Berliandaldo dengan judul “Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif *Collaborative Governance*,” hasilnya menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi ini bisa menambah pemasukan negara dari bidang pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta kesesuaian penataan ruang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian peran dan relasi antara pemangku kepentingan sangat diperlukan pada kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas. Selanjutnya strategi beragam peran dalam pengembangan geowisata ialah melalui implementasi model pentahelix yang mengikutkan partisipasi berbagai pihak.¹¹

⁹ Fauzan Mahfuzh, Ari Subowo, dan Teuku Afrizal, “Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Semarang: Perspektif *Collaborative Governance* Selama Pandemi Covid-19 Di Kampung Wisata Taman Lele,” *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 2 (2022).

¹⁰ Baewuni Muhammad Arif dan Inayati, “Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Indonesia Dalam Perspektif *Collaborative Governance*: Kajian Literatur,” *Sawala Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 1 (2022).

¹¹ Fasa dan Berliandaldo, “Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif *Collaborative Governance*.”

Riset lainnya dilakukan oleh Ryan Anggria Pratama dan Dhani Akbar dengan tema “Transformasi Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Limbah *Studge Oil* untuk Pencapaian *Blue Economy* di Bintan,” hasilnya menunjukkan usaha yang dijalankan oleh pemerintah belum cukup maksimal dan perlunya berganti dari metode lama ke metode yang lebih baru, mengikutkan partisipasi setiap actor baik dari *Government Actors* ataupun *nongovernment actors*. Hal tersebut menjadikan kemudahan pemerintah untuk Menyusun atau menjalankan penanggulangan yang memberikan jaminan tidak terjadinya pelanggaran yang serupa.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan memberikan celah bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait *collaborative governance*, dimana dalam riset sebelumnya belum terdapat riset yang mengkaji terkait Kota Lasem. Adapun Kota Lasem sendiri memiliki beragam potensi yang apabila dioptimalkan maka akan semakin tinggi hasil yang diperoleh. Selain itu, Kota Lasem juga memiliki kearifan lokal, toleransi, dan kebudayaan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga hal tersebut perlu dimaksimalkan agar identitas dari Kota Lasem tidak hilang. Peran masyarakat dan instansi swasta dalam merevitalisasi Kota Lasem sangat diperlukan, sebab peran masyarakat akan menjadikan wilayah tersebut menjadi hidup dan tertata dengan baik karena masyarakat merasa memiliki dan mampu memeliharanya.

Berdasarkan uraian permasalahan serta data yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik guna menjalankan riset dengan judul “Kebijakan Revitalitasi Lasem Kota Pusaka Perspektif *Collaborative Governance*.”

B. Fokus Penelitian

Beracuan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya, yang menjadi fokus riset ini ialah Lasem yang populer dengan istilah Kota Pusaka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Namun, beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran dan kerusakan yang berpotensi menghilangkan identitas dari kota Lasem tersebut. Adapun pemerintah sudah berupaya melakukan revitalisasi atau penataan kembali, namun terjadi permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga

¹² Ryan Anggria Pratama dan Dhani Akbar, “Transformasi Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah *Studge Oil* Untuk Pencapaian *Blue Economy* Di Bintan,” *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

diperlukan kajian untuk menggali lebih dalam terkait kebijakan revitalisasi Lasem sebagai Kota Pusaka perspektif *collaborative governance*.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada riset ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka yang dilakukan oleh Pemerintah?
2. Bagaimana keterlibatan antara Pemerintah dengan masyarakat terkait revitalisasi Lasem Kota Pusaka?
3. Bagaimana dampak kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka?

D. Tujuan Penelitian

Beracuan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka maksud dijalankannya riset ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka yang dilakukan oleh Pemerintah
2. Untuk mengetahui keterlibatan antara Pemerintah dengan masyarakat terkait revitalisasi Lasem Kota Pusaka
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka

E. Manfaat Penelitian

Riset ini juga diinginkan bisa memberikan faedah untuk berbagai pihak lain yang berkaitan dengan revitalisasi Lasem, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Hasil kajian ini diinginkan bisa memberikan keterangan yang sesuai untuk pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam mengambil keputusan terkait program revitalisasi Lasem. Dengan mengetahui perspektif kolaboratif yang tepat dalam mengatasi masalah revitalisasi Lasem, pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien guna menambah mutu hidup masyarakat Lasem.
2. Masyarakat Lasem
Kajian ini diinginkan bisa memberikan faedah untuk masyarakat Lasem dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan, khususnya dalam upaya melestarikan warisan budaya dan seni kerajinan yang ada di

Lasem. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses revitalisasi Lsem, diharapkan mereka dapat mempertahankan beragam nilai budaya dan kearifan lokal yang terdapat di kota mereka.

3. Wisatawan

Wisatawan yang berkunjung ke Lasem dapat merasakan manfaat dari program revitalisasi Lasem yang berhasil dilaksanakan. Dengan adanya kearifan lokal yang terjaga dan dikembangkan, serta infrastruktur dan fasilitas yang memadai, wisatawan dapat menikmati pengalaman yang lebih baik dan mendapatkan informasi yang akurat tentang kebudayaan dan sejarah Lasem.

4. Dunia Pendidikan

Kajian ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk dunia Pendidikan, utamanya bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang revitalisasi budaya. Riset ini juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar pada perkuliahan tentang pengembangan masyarakat dan kebudayaan.

5. Peneliti Selanjutnya

Hasil riset ini juga bisa dijadikan acuan bagi kajian dimasa mendatang terkait dengan revitalisasi budaya dan kearifan lokal di daerah lain. Hasil riset ini juga dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai perspektif kolaboratif dalam mengatasi masalah revitalisasi budaya dan mendorong penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep kolaboratif yang lebih tepat dan efektif dalam mengatasi masalah serupa di daerah lain.

F. Sistematika Penulisan

Guna menyampaikan uraian yang jelas terkait riset ini, maka dirangkailan sebuah sistematika penelitian yang mencakup keterangan dan beragam hal yang diuraikan pada setiap babnya. Adapun sistematika penulisannya ialah:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan siding munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/grafik.

2. Bagian Utama

Dalam penulisan skripsi ini, membagi pembahasan menjadi lima bab, dengan spesifikasi berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud riset, faedah kajian, dan runtutan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi deskripsi teori, kajian sebelumnya, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan dan menerangkan mengenai metode riset yang digunakan dalam kajian ini, yang terdiri dari ragam dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu riset, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil riset yang terdiri dari deskripsi obyek riset, deskripsi data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ialah bagian terakhir yang berisi simpulan dari hasil riset yang dijalankan serta berbagai masukan peneliti berdasarkan dari hasil peneliti dimana yang akan dating serta kritik yang bersifat membangun.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan yang bagian paling akhir yang mencakup daftar pustaka, beragam lampiran, serta daftar riwayat hidup.